

BAB 4

SIGNIFIKANSI PERANAN PARTAI ACEH BAGI TERBENTUKNYA PERDAMAIAN ACEH

4.1. MOU Helsinki Sebagai Landasan Perdamaian

Keberadaan MoU Helsinki diberikan apresiasi positif serta diterima oleh masyarakat Aceh dan Indonesia pada umumnya. Hal ini merupakan titik tolak untuk membuat sebuah perdamaian di Aceh.⁴⁶ Survei yang diadakan oleh Lingkar Survei Indonesia (LSI) pada 2006 menunjukkan bahwa sekitar 67 persen publik Aceh merasa puas dengan masa depan perdamaian di Aceh.⁴⁷ Sementara survei yang serupa diadakan pada level nasional menunjukkan suatu pernyataan bentuk perasaan yang serupa walau dengan persentase lebih kecil yakni 43,9 persen dengan responden yang menyatakan tidak puas mencapai angka 26,8 persen.

Mengenai optimisme pembentukan perdamaian akibat dari MoU Helsinki juga dirasakan serupa dengan mantan anggota GAM yang menjadi responden oleh penelitian serupa yang diadakan oleh World Bank.⁴⁸ Dari hasil survei, ditunjukkan bahwa 84,8 persen mantan anggota GAM aktif menyatakan yakin dan sangat yakin akan adanya keberlanjutan proses perdamaian yang tengah berjalan.

Sikap seperti ini disinyalir bermunculan dari terjadinya bencana tsunami di Aceh pada akhir desember 2004 yang menewaskan kurang lebih 100 ribu masyarakat Aceh. Kehancuran pasca-tsunami juga menyulitkan pasokan logistik bagi para anggota GAM. Sehingga kesemua hal ini mengubah pandangan para anggota GAM menjadi mau dan berkehendak untuk pendesakan rekonstruksi dan rehabilitasi serta merespon berbagai kalangan agar mengusahakan perdamaian yang dirintis dengan berunding bersama pihak dari pemerintah Republik Indonesia.

Dukungan terhadap perdamaian pun sontak paska tsunami mengalir dari komunitas internasional.⁴⁹ Adanya dukungan komunitas internasional ini

⁴⁶ Moch. Nurhasim dkk, *Aceh Baru : Tantangan Perdamaian Dan Reintegrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 140.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 141.

⁴⁸ The World Bank, *The Aceh Peace Agreement: How far Have We Come?* Diakses dari <http://web.worldbank.org> pada tanggal 25 Mei 2009 pukul 20.00 Wib.

⁴⁹ Moch. Nurhasim., *Op.Cit.* hlm. 41.

dikarenakan tanggapan dari komunitas tersebut bahwa MoU Helsinki yang hendak dilakukan paska tsunami merupakan penyelesaian terbaik bagi konflik di Aceh, serta seharusnya menjadi bentuk penyelesaian akhir. Proses perdamaian yang diaspirasikan melalui adanya integrasi GAM kepada Indonesia ini banyak diperbantukan pelaksanaannya oleh komunitas internasional seperti Bank Dunia dan *The International Organisation of Migration* (IOM) dalam bentuk pemaksimalan program pembangunan Aceh paska tsunami dibidang ekonomi dan sosial.

Keberadaan MoU Helsinki dapat dikatakan sebagai fondasi komprehensif bagi pelaksanaan keberlanjutan proses perdamaian di Aceh. Setidaknya ada tiga alasan yang dapat dikemukakan menyangkut hal ini:⁵⁰ *Pertama*, MoU merupakan usaha pertama yang menghasilkan solusi politik dibandingkan dengan Jeda Kemanusiaan dan Perjanjian Penghentian Permusuhan atau COHA yang berfokus pada gencatan senjata di tingkat bawah.

Kedua, MoU merupakan kesepakatan pertama antara pemerintah Indonesia dan GAM yang menjadikan *disarmament* (peluncutan senjata), demobilisasi, dan reintegrasi sebagai suatu kerangka kerja yang integral dalam mengakhiri konflik di Aceh. Demobilisasi ditunjukkan dari adanya penarikan diri pasukan TNI dan Polri non-organik yang menjadikan jumlahnya hanya mencapai sekitar 14.700 dan 9.100 personil sekarang. Sedangkan *disarmament* terwujud dari penyerahan 840 pucuk senjata para personil GAM kepada pihak pemerintah Indonesia. Reintegrasi sendiri dapat dilihat dari adanya penjelasan bahwa pemerintah Indonesia bersedia untuk menyerahkan insentif ekonomi dan memfasilitasi mantan kombatan GAM dan mantan tahanan politik, termasuk dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan. Hak-hak politik mantan anggota GAM pun juga dipulihkan melalui perwujudan pemberian amnesti bagi aktivis GAM, membebaskan tahanan politik, pemberian partisipasi politik dengan cara memperbolehkan pendirian partai politik lokal yang kesemua hal ini dapat dilihat dan diatur dalam MoU Helsinki.

Ketiga, MoU mengatur sejumlah isu penting menyangkut persolaan masa lalu dan masa depan Aceh. Hal ini dapat dilihat tentang adanya pembahasan

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 143-144.

persoalan menyangkut hukum, pemerintahan, penyelesaian pelanggaran HAM, insentif ekonomi, serta mekanisme pelaksanaannya dalam MoU Helsinki. Apalagi, dalam tataran praktis, implementasi MoU diperbantukan oleh lembaga pengawasan internasional terutama Aceh Monitoring Mission yang terdiri dari Uni Eropa, Norwegia, Swiss, dan lima negara ASEAN. Apalagi lembaga internasional ini pun juga memiliki wewenang penuh untuk menghukum pelanggaran dalam butir MoU dan perselisihan diantara kedua belah pihak Indonesia dan GAM dengan hasil keputusan yang bersifat mengikat seperti yang tertera dalam butir lima dan enam MoU Helsinki.

Berfokus pada pelaksanaan MoU, dalam salah satu butirnya dijelaskan bahwa mantan aktivis GAM akhirnya mendapatkan hak politik dalam hal ikut berpartisipasi secara aktif dalam dinamika politik lokal di Aceh. Partisipasi politik secara lebih konkrit dapat dilihat dari adanya keikutsertaan mantan aktivis GAM dalam pilkada langsung yang diselenggarakan di Aceh pada tahun 2006.

Pilkada langsung yang diselenggarakan diujung barat pulau Sumatera ini adalah pilkada yang pertama kali diselenggarakan oleh Indonesia.⁵¹ Pilkada ini digelar secara serentak dengan pemilihan bupati atau walikota di hampir seluruh daerah NAD. Pilkada yang diselenggarakan pada tanggal 11 Desember 2006 serta memperebutkan 20 kursi kepala daerah ini, ternyata juga menjadi ajang kontestasi GAM dalam dunia perpolitikan Indonesia di Aceh. Dari 20 jabatan, GAM berhasil memperoleh 9 posisi kepala daerah yakni, 1 posisi gubernur dan 8 posisi bupati/walikota.⁵²

Kehadiran GAM yang termanifestasikan sebagai calon independen dalam pilkada Aceh sebenarnya merupakan perwujudan dari keinginan yang sudah terbersit oleh para mantan petinggi GAM semenjak awal tahun 2006. Mereka ingin sekali untuk membentuk sebuah demokrasi yang lebih bersih terselenggara di Aceh. Untuk mewujudkannya, para mantan petinggi GAM ini mengadakan persiapan dengan ikut serta dalam kursus singkat pendidikan politik yang

⁵¹ Ikrar Nusa Bakti. *Beranda Perdamaian : Aceh Pasca Tiga Tahun MoU Helsinki* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 137.

⁵² Lihat Edward Aspinnal, *Guerillas in Power*, <http://insideindonesia.org/content/view/full/616/47/> diakses tanggal 5 Mei 2009 pukul 20.30 Wib.

diselenggarakan di Kuala Lumpur, Banda Aceh, dan Swedia semenjak Januari 2006.

Keberadaan calon independen dalam pilkada Aceh ini sebenarnya merupakan hasil dari perdebatan yang cukup alot ditingkatan lokal Aceh sendiri serta nasional. Di tingkat nasional keberadaan calon independen merupakan salah satu klausul yang terdapat pada draf awal yang dipersiapkan DPRD dan pemerintah Propinsi NAD. Di tingkatan nasional pemerintah mulanya tidak menyetujui adanya calon independen dalam pilkada Aceh, apalagi penolakan calon independen pun bergulir hangat di DPR, serta juga di Badan Intelijen Negara. Mereka semua sepakat bahwa apabila pintu calon independen dibuka, nantinya akan ada kekhawatiran besar pada mencuatnya referendum kemerdekaan. Akhirnya perdebatan ini teredam juga dengan diluluskannya butir calon independen tercantum dalam naskah UU Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh.⁵³

Pilkada yang digelar pada tanggal 11 Desember 2006 akhirnya menunjukkan bukti bahwa GAM berhasil memperoleh suara banyak dalam pemilihan. Irwandi Yusuf - Muhammad Nazar, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur jalur independen yang mendapat dukungan penuh dari Sentra Informasi Referendum Aceh (SIRA) merupakan para mantan petinggi GAM yang berhasil memenangkan pilkada gubernur di Aceh. Hal ini mematahkan analisa survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei seperti IFES dan Lingkaran Survei Indonesia yang menyatakan bahwa tokoh-tokoh GAM yang dijagokan dalam pilkada kurang populer dimata masyarakat serta tidak akan memperoleh dukungan suara lebih dari 15 persen dalam pilkada.⁵⁴

Pilkada yang dilaksanakan 2006 ini dianggap paling demokrasi dan berlangsung damai. Hasil survei yang dilaksanakan LSI memperlihatkan bahwa pilkada telah berlangsung secara demokratis dengan indikator kejujuran dan keadilan di pilkada yang mencapai angka 34 %.⁵⁵ Sedangkan untuk ke arah

⁵³ Isi butir tersebut adalah, untuk melaju sebagai calon independen dalam pemilihan gubernur, pasangan calon harus mendapat dukungan setidaknya 3 persen dari jumlah penduduk yang tersebar lebih dari 50 % kabupaten/ kota atau sekitar 120.000 penduduk yang dibuktikan melalui fotokopi KTP.

⁵⁴ Ikrar Nusa Bhakti. *Op.Cit.*, hlm. 140-142.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 191.

harapan proses perdamaian akan berjalan dengan indikator terlaksananya perbaikan ekonomi dan perubahan besar di Aceh mencapai angka 54,4 % dan 41%.⁵⁶ Sikap optimistik masyarakat Aceh semacam ini menunjukkan adanya keinginan besar dari para pemilih terhadap perubahan strategi politik di Aceh dibandingkan era Orde Baru dahulu. Hal ini ditaruh oleh para pemilih dengan memberikan kepercayaan besar bagi GAM untuk dapat memimpin Aceh ke arah yang lebih baik.

Kemenangan calon independen ini menjadi titik tolak awal bagi adanya pendapatan kepercayaan dari masyarakat kepada partai politik lokal di Aceh. Apalagi hal ini menjadi landasan untuk partai lokal untuk menguasai parlemen dalam pemilu 2009. Pasangan pemenang pilkada Irwandi - Nazar pun juga lantas menyikapi dorongan untuk penguatan keberadaan partai politik lokal di Aceh.⁵⁷

4.2. Partai Lokal Di Aceh dan Dampaknya Kepada Perdamaian Aceh

Keberadaan partai politik lokal di Aceh mewarnai konstalasi politik Aceh yang sebelumnya terwujud dengan persaingan partai nasional di Aceh sendiri. Keberadaanya partai lokal yang merupakan perwujudan dari Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki ini adalah konsekuensi dari pemasukan unsur-unsur masyarakat Aceh yang tidak dapat diabaikan. Apalagi keputusan pendirian partai lokal Aceh ini juga menjadi petunjuk bagi adanya aspirasi dari mantan anggota GAM untuk berpartisipasi dalam proses politik secara demokratis.⁵⁸

Secara teoritis, partai politik berperan sebagai sarana untuk mengoperasionalkan fungsi-fungsi politik, seperti sosialisasi politik, rekrutmen politik, artikulasi politik, dan agregasi kepentingan politik masyarakat. Fungsi ini terkait dengan kedudukan partai politik sebagai salah satu unit yang berperan dalam sistem politik. Sistem politik sendiri menurut pendekatan Fungsional Estonian terdiri dari dua sub sistem yakni infrastruktur politik, dan suprastruktur politik. Infrastruktur mencerminkan suasana kehidupan politik di

⁵⁶ *Ibid.*, hlm.. 192.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 195.

⁵⁸ Aguswandi dan Judith Large (ed), *Rekonfigurasi Politik:Proses Perdamaian di Aceh*, (London: Jurnal ACCORD Issue 20, 2008), hlm. 57.

tingkatan masyarakat dengan disertai adanya dinamika organisasi sosial-politik. Sedangkan suprastuktur politik merupakan suasana politik di dalam pemerintahan dan berkaitan dengan peranan pemerintah dan fungsi lembaga-lembaga pemerintahan.⁵⁹

Eksistensi parpol lokal di Aceh memang tidak menjadi perdebatan yuridis lagi setelah UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan PP No. 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh memberikan legitimasi yang jelas. Keberadaan partai politik menjadi titik penting bagi proses politik di Aceh. Kehadirannya menunjukkan adanya dinamika politik yang cukup tinggi dalam mengartikulasikan kepentingan melalui jalur formal. Kehadirannya juga menjadi bukti adanya upaya membuka diri untuk memperebutkan kekuasaan secara sah.

Kehadiran partai politik lokal merupakan wujud apresiasi dari keberlangsungan perdamaian di Aceh. Ruang politik bagi masyarakat lokal dibuka oleh pemerintah. Hal ini bahkan menjadi kesempatan untuk mengakhiri transisi politik dan mengarahkannya kedalam situasi yang lebih permanen untuk berdemokrasi. Partai politik lokal menjadi elemen penting bagi terjaganya perdamaian antara pihak GAM dan pemerintah Indonesia di Aceh dikarenakan sifatnya yang mengakomodir kepentingan rakyat Aceh tetapi tidak lepas dari kontrol NKRI.⁶⁰

Partai politik lokal dibingkai bukan oleh kekhasan ideologis yang berbeda dengan partai politik nasional, tetapi oleh kompetensi kewilayahan. Partai politik lokal memiliki kesempatan untuk melakukan kontestasi politik di Aceh. Partai politik lokal dengan berbagai peluang yang ada di masyarakat, tidak menutup kemungkinan untuk dapat mengungguli partai politik nasional dalam ajang pemilihan umum 2009. Apalagi, kemenangannya dapat menjadi kemenangan ideologis yang mampu membebaskan Aceh dari segala bentuk inferioritas dan keterasingan dari bingkai NKRI.

⁵⁹ Ikrar Nusa Bhakti. *Op.Cit.*, hlm. 198.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 199.

4.3. Dinamika Partai Aceh Pasca MOU Helsinki

Partai GAM yang kemudian hari menjadi Partai Aceh merupakan salah satu partai lokal di Aceh sekaligus partai lokal tertua di Aceh dan memiliki pengaruh paling penting di masyarakat Aceh.⁶¹ Partai ini mempunyai misi untuk mentransformasikan sekaligus membangun wawasan berpikir masyarakat Aceh dari persepsi partai revolusi menjadi partai pembangunan. Elit politik GAM yang terlibat dalam jajaran pimpinan partai Aceh sendiri sebenarnya telah sadar untuk mengakhiri peperangan selama 30 tahun dengan pemerintah Indonesia. Perang hanya menimbulkan kerugian jiwa dan harta benda bagi masyarakat Aceh. Oleh karenanya hal ini menimbulkan kesadaran elit-elit politik GAM untuk melakukan perjuangan politik demokrasi untuk memperlihatkan masa depan Aceh yang lebih bermartabat.

Keberadaan partai lokal, pengakomodasiannya serta pengontrolan terhadap keberadaannya dalam pemilihan umum 2009 oleh berbagai tim pemantau terutama Komite Independen Pemilihan, merupakan perwujudan dalam pelestarian proses perdamaian di Aceh. Oleh karenanya, seperti yang dikatakan Albert Einstein, damai bukan hanya sekedar ketiadaan perang, tetapi juga adanya keadilan, partisipasi rakyat, hukum, ketertiban, dan adanya pemerintahan.⁶² Adanya partai politik lokal merupakan perwujudan dari semangat partisipasi masyarakat lokal Aceh itu sendiri. Partisipasi yang berjalan ini menjadi sandaran pengetahuan dan tindakan untuk kehidupan masyarakat Aceh yang lebih baik. Keberadaan partai lokal diharapkan menjadi perjuangan untuk memberikan tindakan dan kebijakan afirmasi bagi masyarakat lokal yang kurang beruntung terutama dalam segi ekonomi dan pendidikan. Kewaspadaan terhadap tindakan mantan aktivis GAM yang menjadi jajaran pengurus partai lokal di Aceh selayaknya perlu diredam, keberadaan TNI sebagai satuan pengaman masyarakat Aceh haruslah mampu untuk mewujudkan perdamaian Aceh. Stigma tentang GAM haruslah dihilangkan dari pihak TNI. TNI harusnyalah menindak setiap komponen mantan aktivis GAM tidak terkecuali masyarakat sipil lainnya yang hendak mengacaukan keamanan di Aceh. Kemudian peran media masa pun menjadi penting sebagai penyebar akses mengenai demokratisasi dan perdamaian

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 206.

⁶² *Ibid.*, hlm. 215.

terutama pada saat pelaksanaan pemilu yang mengikutsertakan partai politik lokal. Dengan adanya kerjasama yang baik oleh semua pihak tersebut maka stabilitas perdamaian di Aceh akan tetap terjaga.

4.4. Prospek dan Tantangan Masyarakat dan Partai Nasional Terhadap Keberadaan Partai Aceh sebagai salah satu Pihak Pendorong Perdamaian di Aceh

Dibolehkannya berdirinya partai politik lokal merupakan hal maju dalam penyelesaian konflik di Aceh. Saat perundingan damai era Megawati Soekarno Putri, pemerintah kala itu tidak mengizinkan berdirinya partai politik lokal sebagai salah satu cara untuk membujuk GAM mengakhiri perjuangan bersenjata dengan memberi kesempatan mereka menyalurkan hak politik dalam pemilu seperti halnya *Sinn Fein* di Irlandia Utara maupun *Partie Quebecois* di Kanada.⁶³

Keberadaan partai politik lokal Aceh terutama partai Aceh di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sebenarnya kalau ditilik adalah bentuk akomodasi terhadap respon masyarakat yang bernilai positif terhadap keberadaan partai lokal. Survey yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 28 Juli-2 Agustus 2005 dan Maret 2006 menunjukkan masyarakat Aceh mayoritas mendukung pembentukan partai lokal. Bahkan Prof. Wiliam Liddle, pakar politik dari Ohio State University, juga menyetujui adanya pemberian kesempatan GAM untuk bersaing dalam pemilihan umum di Aceh yang dianggap cara ampuh untuk mewujudkan Aceh damai.⁶⁴

Rakyat Aceh menyambut dengan baik di saat partai Aceh benar-benar terwujud di Aceh. Banyaknya partai lokal Aceh yang bermunculan dan akhirnya dibatasi menjadi enam partai lokal saja yang ikut serta dalam kontestan pemilu 2009 memberikan kemungkinan yang lebih luas bagi rakyat Aceh untuk menyalurkan aspirasinya dan meraih peluang untuk memperjuangkan hak-haknya serta menyumbangkan kewajibannya sebagai warga negara. Dengan banyaknya alternatif pilihan dan meluasnya gerak partisipasi rakyat memberikan indikasi kuat bahwa sistem pemerintahan di tangan rakyat sangat mungkin diwujudkan.

⁶³ *ICG Report No. 40, Aceh: A New Chance for Peace*, 15 Agustus 2005.

⁶⁴ *Koran Acehkita*, Edisi 025/TH Ke-3, 8-14 Oktober 2007.

Momentum pemilihan umum 2009 dengan keterlibatan partai politik lokal berdasarkan UU Pemerintah No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mampu mengantarkan Aceh ke arah terwujudnya perdamaian yang lebih mapan dan demokratis.

Berkaca dari kemenangan calon independen yang mantan aktivis GAM, Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar dalam ajang kontestasi pilkada 2006 membuktikan bahwa rakyat Aceh tidak merasa takut atau waspada terhadap tindak tanduk aktivis GAM yang disinyalir akan membawa kepada munculnya sentimen kemerdekaan. Tetapi sebaliknya, hal ini justru membuktikan adanya kekecewaan yang besar dari masyarakat Aceh terhadap Republik Indonesia, sehingga mereka menaruh kepercayaan yang besar bagi GAM untuk dapat memimpin Aceh ke arah yang lebih baik, apalagi dari mantan aktivis GAM ini sentimen merdeka sudah tidak ada lagi, tetapi yang mencuat adalah pembentukan pemerintahan Aceh yang otonom di bawah naungan NKRI.

Hal inilah yang menjadi titik tolak kepercayaan masyarakat kepada kehadiran partai lokal, sehingga partai politik lokal Aceh pun menjamur, dan menjadikan enam partai politik lokal yang lolos verifikasi KPU untuk menjadi peserta Pemilu 2009.⁶⁵ Rakyat Aceh berharap penuh dengan keikutsertaan mereka dalam ajang kontestasi pemilihan umum di Aceh karena ini menjadi sarana untuk mengaktualisasikan keinginan mereka membentuk demokratisasi di Aceh serta menjaga perdamaian Aceh. Dengan adanya partisipasi maka gerakan perubahan sosial dan proses tanggungjawab bersama masyarakat dalam memperbaiki kehidupan niscaya akan tercapai. Partisipasi juga menjadi energi yang dapat mencegah perdamaian rusak oleh tangan-tangan yang tidak kelihatan dan suara-suara penuh dengki, karena ibarat Aceh sebagai sebuah rumah, setiap sudut rumah telah dijaga oleh setiap elemen masyarakat Aceh itu sendiri.

⁶⁵ Partai yang lolos tersebut adalah Partai Aceh, Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA), Partai Bersatu Atjeh (PBA), Partai Rakyat Aceh (PRA), Partai Aceh Aman Sejahtera, Partai Daulat Aceh, selengkapnya lihat *Serambi Indonesia* edisi 09/07/2008.

4.4.1 Tanggapan Partai Lokal Terhadap Partai Aceh

Dinamika politik Aceh merupakan suatu permasalahan yang harus dilihat bukan dalam sistem kedaerahan yang ingin dimapankan, akan tetapi lebih kepada usaha menyatukan antara lokal dan nasional, dengan mewujudkan dunia perpolitikan Aceh secara substantif.⁶⁶ Dalam hal perwujudan dunia perpolitikan yang aktif, kelihatan bahwa masyarakat lebih melihat kepada figur partai mana yang dekat dengan keinginan rakyat dibanding melihat entitas tokoh partainya.

Menurut petinggi partai SIRA, dinamika politik Aceh sangatlah fluktuatif, tidak konsisten, hal ini bisa dilihat misalnya di kawasan Gayo Lues, Simeulu, Aceh Tenggara, tidak dominan kursi disana untuk pemilu 2009.⁶⁷ Istilah fluktuatif yang dimaksudkan oleh petinggi partai itu lebih tepatnya mengarah kepada penurunan dalam kepentingan politik oleh masyarakat. Pemilih di Aceh jumlahnya tidak terlalu banyak, hanya tiga juta orang, sehingga hal ini menyebabkan dinamika politik yang terjadi tidak terlalu terlihat apabila dibandingkan dengan Jakarta yang berpenduduk banyak.

Partai lokal di Aceh dipandang penuh dengan intrik. Apalagi hal ini dianggap oleh petinggi partai SIRA terjadi kepada partai Aceh. Partai SIRA memandang partai Aceh banyak melakukan intimidasi dalam pemilu 2009. Hal ini bisa dilihat dengan terjadinya pelanggaran di lapangan saat pemilu. Misalnya saja timbulnya korban akibat pembakaran dua mobil transportasi SIRA yang disinyalir dilakukan oleh oknum partai Aceh, selain itu juga terjadi intimidasi terhadap saksi menyangkut hal tersebut. Hanya ANFREL yang berani bilang bahwa terjadi intimidasi oleh partai Aceh, sedangkan kelompok lembaga swadaya masyarakat lainnya membungkam saat ditanya mengenai hal ini.⁶⁸

Partai SIRA menganggap partai Aceh tidak terlihat di masyarakat, partai ini berbentuk elitis. Partai ini mencuri hal-hal yang disepakati dalam pemilu, misalnya saja ketika masa tenang kampanye 2009 partai Aceh melakukan kampanye-kampanye terselubung untuk mengikat hati rakyat, menyuap tokoh masyarakat agar memilih partai Aceh.

⁶⁶ Wawancara dengan Taufik Abda Ketua Partai SIRA Aceh, di Banda Aceh, 13 Mei 2009.

⁶⁷ Wawancara dengan Taufik Abda Ketua Partai SIRA Aceh, di Banda Aceh, 13 Mei 2009.

⁶⁸ Wawancara dengan Taufik Abda Ketua Partai SIRA Aceh, di Banda Aceh, 13 Mei 2009.

Akan tetapi mengenai relasi sosial dengan Partai Aceh, Partai SIRA tetap menganggap komunikasi perlu tetap dijalankan. Akan tetapi masa lalu partai Aceh yang bertransformasi menjadi GAM merupakan hal yang tidak boleh dilupakan begitu saja. Secara struktural, Partai Aceh sudah terlihat bagus sama dengan bentuk struktur partai di Indonesia pada umumnya. Akan tetapi, secara pola pikir, Partai Aceh masih menggunakan pola pikir separatis. Gerakan yang digunakan Partai Aceh bukanlah kampanye biasa saja, tapi disertakan hal-hal yang meramaikan lagi persoalan separatisme dengan pendekatan ketakutan dan propaganda mengumbar janji kepada masyarakat agar memilih Partai Aceh, kalau tidak masalah separatis akan terus menguat.

Partai SIRA memandang aktivis Partai Aceh secara kualitas perlu melakukan transformasi pola pikir, pola pikirnya haruslah diubah untuk menjaga keutuhan NKRI dan melanjutkan perdamaian.⁶⁹ Partai Aceh diharapkan menggunakan cara-cara yang adil dan jujur dalam berkampanye dan meraih suara. Pihak Partai SIRA memandang bahwa Partai Aceh tetaplah diberikan kesempatan untuk bergerak maju dalam dinamika politik lokal, akan tetapi hal ini haruslah disertai dengan mekanisme pengawasan terhadap segala kegiatan partai. Karena terlihat bahwa relasi politik yang terjalan oleh Partai Aceh dengan partai lokal lain, serta parta nasional masih di tataran luar penampakan saja. Bila ditilik masalah ideologi partai maka Partai Aceh masih tetap berpaham separatis. Hal yang utama adalah Indonesia harus menjadi baik, segala macam bahaya keamanan berkurang sehingga hal ini nantinya akan berdampak kepada Aceh sendiri. Perdamaian di Aceh tentu saja akan bisa berlanjut dan hal ini akan mengurangi atau melenyapkan kehadiran sentimen-sentimen memerdekakan diri atau berbuat separatis dari para mantan aktivis GAM terutama yang bergabung di dalam Partai Aceh.

⁶⁹ Wawancara dengan Taufik Abda Ketua Partai SIRA Aceh, di Banda Aceh, 13 Mei 2009.

4.4.2 Tanggapan partai Nasional Terhadap Partai Aceh

Sementara itu tanggapan partai nasional mengenai keberadaan Partai Aceh, dapat dilihat misalnya pada tanggapan Partai Demokrat.⁷⁰ Partai Demokrat memandang keberadaan Partai Aceh sama saja dengan partai nasional dan partai lokal Aceh lainnya. Partai Demokrat tidak mempersoalkan masa lalu Partai Aceh yang berasal dari kelompok gerakan bersenjata separatis GAM. Sekarang ini, pada masa pemilu 2009 yang terpenting adalah bagaimana caranya para aktivis parpol tetap bisa bersaing dengan sehat dan semuanya tetap konsisten untuk melanjutkan misi-misi perdamaian, memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Partai Demokrat melihat peta perpolitikan di Aceh saat ini berbeda dengan peta perpolitikan saat MoU Helsinki belum ditandatangani.⁷¹ Kondisi spesifik saat itu berbeda, pemilu 1999 di Aceh ada darurat militer dimana rakyat Aceh termasuk para anggota partai saling bertentangan, tidak ada suatu kesepakatan bersama. Barulah pada tahun 2004 peta politik lokal Aceh sudah agak menyamakan peta politik nasional, hanya waktu itu ada hal-hal yang sedikit berbeda, hanya di tingkatan kota sikap saling berkeras kepala para aktivis partai masih terjadi .

Pada tahun 2004 posisi Partai Demokrat, masih belum terformat dengan baik dan mapan seperti sekarang ini untuk tingkatan Aceh. Partai Demokrat dianggap partai politik yang masih bersih oleh rakyat Aceh. Ini menjadikan Partai Demokrat berada di urutan keenam dalam pemilihan umum tahun 2004 lalu. Apalagi rekam jejak partai ini terus meningkat bagus, para aktivis Partai Demokrat yang termasuk dalam kabinet Susilo Bambang Yudhoyono ikut serta dalam menandatangani MoU Helsinki dan berdamai dengan pihak GAM. Hal ini tentu saja berlanjut ke dalam cara pandang Partai Demokrat terhadap Partai Aceh yang merupakan transformasi dari GAM. Ini dianggap sebagai sesuatu hal yang

⁷⁰ Wawancara dengan Nova Iriansyah Ketua Partai Demokrat Aceh, di Banda Aceh tanggal 12 Mei 2009.

⁷¹ Wawancara dengan Nova Iriansyah Ketua Partai Demokrat Aceh, di Banda Aceh, tanggal 12 Mei 2009.

biasa saja, suatu konsekuensi yang harus diterima dari pelaksanaan MoU Helsinki tentang pengizinkan pendirian partai lokal di Aceh.

Berikut adalah tabel yang menunjukkan jumlah perolehan kursi partai politik lokal dan nasional di Aceh pada Pemilu Legislatif tahun 2009. Terlihat bahwa Partai Aceh sebagai partai politik lokal berada di urutan pertama dengan perolehan suara yang jauh melampaui suara-suara yang diperoleh partai nasional.

Tabel 4.1
Jumlah Anggota Partai Politik Terpilih
untuk Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Pemilu 2009

Partai Politik	Jumlah Anggota Terpilih
Partai Aceh	33 orang
Partai Demokrat	10 orang
Partai Golongan Karya	8 orang
Partai Amanat Nasional	5 orang
Partai Keadilan Sejahtera	4 orang
Partai Persatuan Pembangunan	3 orang
Partai Daulat Aceh	1 orang
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1 orang
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1 orang
Partai Patriot	1 orang
Partai Kebangkitan Bangsa	1 orang
Partai Bulan Bintang	1 orang
Total Anggota terpilih	69 orang

Sumber: Komite Independen Pemilu Aceh, 2009.

Partai Demokrat tidak menganggap iri dan hal ini tidak memunculkan suatu kritikan besar terhadap Partai Aceh yang mendapat dukungan besar dalam pemilu 2009.⁷² Partai Demokrat justru melakukan segala strategi untuk mengoptimalkan kinerja mesin partai, mengurangi citra negatif partai, menjalin hubungan baik dengan partai lokal lainnya dan masyarakat Aceh pada umumnya.

⁷² Wawancara dengan Nova Iriansyah Ketua Partai Demokrat Aceh, di Banda Aceh, tanggal 12 Mei 2009.

Partai Demokrat yang juga sebagai penggagas MoU, menganggap perdamaian itu hal final yang harus dilakukan. Salah satu cara mewujudkan dan melanjutkan kesepakatan perdamaian adalah dengan mengakui keberadaan partai lokal, termasuk Partai Aceh, hal ini dilakukan tanpa melihat bagaimana latar belakang Partai Aceh sebelumnya. Partai Demokrat tidak memandang curiga akan ketakutan timbulnya isu-isu separatis yang dibawa oleh oknum Partai Aceh. Hal ini ditambah dengan fakta bahwa 16 kota di Aceh, disertai tingkatan propinsi, pemilu berjalan dengan damai pada saat pemilu legislatif 2009 kemarin. Fakta ini berujung kepada optimisme bahwa proses demokrasi yang diharapkan akan tercapai, dan perdamaian tetap akan berlanjut.

4. 5. Pandangan Militer Terhadap Partai Politik Lokal di Propinsi NAD

Dalam bukunya “*Aku Hanya Tentara: catatan militer, kepemimpinan, dan kebangsaan*”, Letnan Jenderal TNI (Purn) Kiki Syahnakri mengungkapkan bahwa Pemerintah RI dan Parlemen (DPR) dihadapkan pada pilihan sulit pasca perundingan RI - GAM di Helsinki terkait dengan salah satu butir kesepakatan tersebut yang memperbolehkan berdirinya partai politik lokal di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.⁷³ Menurutnya, butir kesepakatan tersebut menyulut kontroversi dengan luasnya tanggapan kritis pro dan kontra dari berbagai kalangan, dikarenakan esensi butir tersebut yang mengusung beberapa resiko dan implikasi yang membawa kepada pilihan sulit.

Dari wacana tentang parpol lokal di Aceh dapat dipetik berbagai argumentasi dan masukan berarti bagi para pengambil keputusan. Namun demikian, disisi lain juga terdapat pandangan simplisistis misalnya dengan mengatakan berbagai alasan penolakan kehadiran parpol lokal bukan bersifat substansial melainkan hanya persoalan yuridis formal belaka.⁷⁴

Opini semacam itu tidak sepenuhnya benar karena justru ada beberapa hal yang fundamental dan esensial melatari berbagai argumentasi penolakan atau setidaknya ketidak hatian terhadap kesepakatan pembentukan parpol lokal. Argumentasi tersebut dapat dirangkumkan menjadi beberapa poin yakni; pertama,

⁷³ Kiki Syahnakri, *Aku Hanya Tentara* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2008), hlm. 259.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 259.

parpol lokal boleh diapresiasi sebagai sebuah “kemajuan” dari kacamata demokrasi dan desentralisasi yang mendukung penguatan *civil society* pada level akar rumput. Sentralisasi politik yang selama puluhan tahun telah memperkecil hak-hak politik rakyat dan memangkas daya kritis masyarakat bukan hasil rekayasa yang sesuai kehendak penguasa. Karena itu dipandang ideal manakala partai politik lokal mapan posisinya sebagai agregator dan katalisator timbunan aspirasi rakyat dari tingkat bawah tanpa harus berbenturan dengan kepentingan partai politik lain misalnya atau oleh elit politik yang terbukti lebih mengutamakan kepentingan sendiri. Partai politik lokal lebih sesuai untuk diterapkan di Negara dan Bangsa yang homogen karena tingkat resikonya dan potensi konflik yang rendah ketimbang Indonesia yang plural dari banyak aspek. Hakekatnya upaya desentralisasi politik sebenarnya tidaklah harus dibarengi dengan keberadaan parpol lokal.⁷⁵

Kedua, pendirian parpol lokal bertentangan dengan prinsip dan hakekat parpol ideal-demokratis yang sejatinya inklusif, non-primordial, non-sektarian, dan pro-pluralisme. Menteri Sekretaris Negara, Yusril Ihza Mahendra mengutarakan kemungkinan dilakukan amandemen terhadap UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi NAD bukan terhadap UU No.31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. Titik krusial dari persoalan ini tidak terletak pada UU yang diamandemen melainkan apakah kebijakan itu tepat dan benar dari perspektif keutuhan bangsa dan negara RI terkait dengan pendirian partai politik lokal di NAD.

Ketiga, ada pendapat eksistensi parpol lokal tidak koheren dengan tubuh atau menguatnya separatisme. Menurut J.Kristiadi, separatisme memang tumbuh subur diladang kemiskinan, ketidakadilan, dan penindasan oleh penguasa pusat. Karena itulah, masalah Aceh tidak dapat dicarikan solusinya dengan pendekatan militer tetapi haruslah dihampiri secara integral dan komprehensif dengan pendekatan multi aspek. Namun, dalam konteks partai politik lokal, aspirasi separatisme justru dapat menemukan kanalisasi legal-formal untuk diperjuangkan dan diaktualisasikan sehingga bukanlah hal mustahil dapat tumbuh di daerah yang sebenarnya bukan ladang subur untuk ide separatis. Maka, partai politik lokal

⁷⁵ *Ibid.* hlm. 260.

dapat menjadi penyemai dan corong bagi separatisme. Memang partai politik lokal dapat dipagari dengan tegas melalui UU. Akan tetapi, di negeri ini pemberlakuan hukum secara efektif belum dapat mencegah adanya separatisme.

Keempat, khusus berkenaan dengan Aceh, semua rakyat menginginkan perdamaian di Aceh. Karena itulah pemerintah perlu terus didesak untuk membangun Aceh untuk membangun keadilan dan kesejahteraan dalam atmosfer kedamaian dan keamanan. Komitmen itu pula haruslah dijaga oleh GAM dan dapat diawasi oleh pemerintah.

Kelima, pemerintah saat ini masih dihadapkan dengan masalah-masalah di berbagai aspek. Seperti yang diketahui, Indonesia tidak memiliki institusi yang kuat (eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik atau bahkan TNI) yang bisa menangani persoalan-persoalan tersebut dan bahkan partai politik lokal disinyalir bisa membantu diseminasi benih separatisme.

Oleh karena itu dalam bingkai demokrasi yang dijunjung tinggi pelaksanaannya oleh segenap elemen masyarakat Indonesia, maka kehadiran parpol lokal haruslah diberikan apresiasi setinggi mungkin pula sebagai bentuk inovasi terhadap pelaksanaan demokratisasi di Indonesia. Namun, dalam menyikapinya maka yang diperlukan adalah pola pikir yang menyeluruh bukan secara parsial dalam memandang kehadiran partai politik lokal. Partai politik lokal harus dipandang sebagai bagian dari perwadahan kepentingan masyarakat secara umum.